

DPRD DKI Bahas Penghapusan Penghapusan 417 Bus Transjakarta

JAKARTA (IM) - Komisi C DPRD DKI Jakarta menggelar rapat dengan agenda pembahasan permohonan penghapusan barang milik daerah (BMD) berupa kendaraan dinas operasional (KDO) sebanyak 417 unit, Rabu (8/3). Adapun 417 unit KDO itu berupa bus transportasi Jakarta (Transjakarta).

Untuk diketahui, permohonan penghapusan BMD itu diajukan Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta melalui Badan Pengelola Aset Daerah (BPAD) DKI Jakarta kepada Komisi C DPRD DKI Jakarta. Sekretaris Dishub DKI Jakarta, Ismanto berujar, sebanyak 417 bus itu terdiri dari berbagai merek seperti Zhontong, Yutong, Hino, Mercedes, Hyundai, Komodo, Anka, serta Inobus.

“Yang mau dipindah-tangankan (dihapuskan) ini merupakan bus yang tercatat di Dishub dan bukan termasuk dalam bus yang terkena sengketa,” ucap Ismanto saat rapat bersama Komisi C di Gedung DPRD DKI Jakarta.

Bus tersebut akan dihapuskan karena usianya sudah tua, di atas tujuh tahun. Ratusan unit itu terdiri dari bus berbahan bakar minyak dan berbahan bakar gas.

Berdasarkan catatan Dishub DKI yang diterima, sebanyak 299 unit di antaranya berbahan bakar gas. Kemudian, sisanya atau sebanyak 118 unit bus berbahan bakar solar.

Ismanto mengungkapkan, proses permohonan persetujuan penghapusan 417 unit bus itu telah berlangsung sejak 2018. Namun, ia mengakui bahwa pembahasan permohonan persetujuan penghapusan dengan Komisi C memang baru berlangsung pada Rabu ini.

Selama 2018-2023, untuk memohon persetujuan penghapusan itu, Ismanto mengakui Dishub DKI harus bersurat kepada BPAD DKI Jakarta hingga gubernur DKI Jakarta. • yan

Pemkot Depok Minta BPJT Lebar Jalan Raya Sawangan

DEPOK (IM) - Wakil Wali Kota Depok, Imam Budi Hartono meminta Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melebarkan Jalan Raya Sawangan agar bisa mengurangi kemacetan yang terjadi di daerah tersebut akibat adanya pintu keluar dan masuk tol.

“Untuk Jalan Raya Sawangan, kami sama-sama berjuang, DPRD, Pemerintah Kota Depok, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok, karena ada sebuah janji MoU dengan BPJT pemilik jalan tol,” kata Imam Budi Hartono di DPRD Kota Depok, Rabu (8/3).

Pemkot Depok melalui Dinas Perhubungan telah menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan BPJT terkait pelebaran Jalan Raya Sawangan. Dalam MoU tersebut, tertuang janji pelebaran jalan dari dan menuju pintu keluar tol Rangkapan Jaya.

“Janji pelebaran dari pintu masuk dan keluar tol Rangkapan Jaya, ke arah kiri ke perempatan Mampang dan ke arah kanan ke Parung Bingung akan dilebarkan.

Namun, sudah hampir dua tahun sejak MoU tersebut ditandatangani janji tersebut belum dilaksanakan,” kata Imam Budi.

Selain itu Pemkot Depok juga telah mencari solusi guna mengatasi kemacetan di Jalan Raya Sawangan, yaitu dengan melebarkan jalan alternatif dari Cipayung menuju Pasir Putih.

“Karena Jalan Raya Sawangan merupakan Jalan Nasional, sulit bagi kami mengambil kebijakan, Pemkot Depok ingin mendapatkan dukungan dari seluruh Anggota DPRD serta seluruh warga Kota Depok untuk bisa membuat janji alternatif dari Cipayung menuju Pasir Putih,” katanya.

Menurut dia, jalur tersebut kerap kali digunakan oleh masyarakat dari pusat Kota Depok untuk bisa sampai ke Sawangan. Ia menjelaskan, perencanaan ini sudah dibuat sejak tahun 2022.

“Mudah-mudahan di tahun 2023 ini bisa dilaksanakan dengan kebesaran hati para masyarakat pemilik bangunan yang ada di sekitar jalan tersebut. Mohon dukungan doa dan kerja sama antara kami Pemkot Depok dengan teman-teman DPRD Kota Depok,” katanya.

Sementara itu, Ketua Komisi C DPRD Kota Depok, Edi Sitorus mengatakan, usulan pelebaran Jalan Raya Sawangan berasal dari Komisi C yang disampaikan dalam Sidang Paripurna yang tertuang dalam pokok pikiran (pokir) anggota DPRD Depok.

“Dulu sebetulnya ada janji dari BPJT, dari pusat bahwa dengan adanya jalan tol yang keluar di Sawangan memang harus ada pelebaran dan perluasan namun hingga saat ini belum dilakukan tindak lanjut dari yang sudah dijanjikan oleh pusat,” ujarnya. • yan

PENGUMUMAN RINGKASAN RANCANGAN PENGAMBILAN PT DATA TEKNOLOGI MANDIRI

Pengumuman ringkasan rancangan pengambilan ini diumumkan untuk memenuhi ketentuan Pasal 127 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja juncto Pasal 29 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas.

PT DATA TEKNOLOGI MANDIRI, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut hukum negara Indonesia dan berkedudukan di Kabupaten Badung (“Perseroan”) dengan ini mengumumkan bahwa:

Nona SRINA ISFIN BR. GINTING akan mengalihkan 49% (empat puluh sembilan persen) saham kepada **Nona KRISTIN STEVANI WIDWOR** melalui pembelian dan pengalihan saham langsung dari pemegang saham.

Segala permintaan informasi dan/atau keberatan dari pihak-pihak yang berkepentingan, termasuk para kreditor (jika ada) terhadap rancangan pengambilan ini harus disampaikan selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak tanggal pengumuman ini ke alamat sebagai berikut:

PT DATA TEKNOLOGI MANDIRI
Jalan Patih Jelantik,
Kelurahan Legian, Kecamatan Kuta,
Kabupaten Badung, Provinsi Bali

Bali, 09 Maret 2023
Direksi PT DATA TEKNOLOGI MANDIRI

INFORMASI PENUTUPAN KANTOR CABANG KB BUKOPIN

Yth Nasabah KB Bukopin,

Dengan ini kami informasikan bahwa efektif pada tanggal 31 Maret 2023 akan dilakukan penutupan layanan Kantor Cabang Operasional sebagai berikut:

Kantor Cabang Pembantu Penuin

Pertokoan Citra mas
Blok A No. 22 Batam

Terkait dengan penutupan layanan tersebut, Nasabah KB Bukopin tetap dapat melakukan transaksi di seluruh jaringan cabang dan e-channel Bank KB Bukopin.

Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi:
Halo KB Bukopin 14005 dan Bank KB Bukopin
Kantor Cabang Batam (0778) 458725

Hormat Kami,
PT Bank KB Bukopin, Tbk

KB Bukopin

4 | Metropolis

FOTO/ANT



MOU IADO DENGAN PB PERPANI

Sekretaris Jenderal Indonesia Anti-Doping Organization (IADO) Eka Wulan Sari (kedua kiri) berjabat tangan dengan Wakil Sekertaris Jenderal I PB PERPANI Kuswahyudi (kedua kanan) didampingi Director of Testing IADO Linda Rosalina (kiri) dan Waketum II Pembinaan dan Prestasi PB Perpani Abdul Razak (kanan) se usai penandatanganan naskah nota kesepahaman (MoU) di Jakarta, Rabu (8/3). Nota kesepahaman tersebut merupakan komitmen untuk mendukung terciptanya “zero doping” dalam ekosistem olahraga.

Pertamina Didesak Bangun Rusun Relokasi Plumpang

Sebenarnya ada dua pilihan lokasi yang bisa dijadikan tempat relokasi bagi warga yakni Rusunawa Nagrak dan Wisma Atlet. Namun, saat Ida berdialog dengan warga, warga menolak usul untuk direlokasi ke Rusunawa Nagrak karena lokasinya yang jauh. Nah, ini kan memungkinkan kalau memang mereka mau di Wisma Atlet.

JAKARTA (IM) - Legislator DKI Jakarta mendesak Pemprov DKI dan Pertamina agar warga Plumpang bisa direlokasi ke tempat yang lebih aman. Hal itu diusulkan setelah Komisi D DPRD DKI Jakarta meninjau langsung lokasi bekasaran Plumpang, di Kelurahan Rawa Badak Selatan, Koja, Jakarta Utara.

“Ya saya kemarin kebetulan ke lapangan. Jadi memang, dia nempel betul

rumah penduduk ini nempel betul-betul dengan pagar Pertamina. Ini tidak berbicara apakah depo mau dipindahkan oleh Pak Eric atau tidak, pindah ini kan butuh waktu, berapa tahun pemindahan itu. Nah, berbicara butuh waktu ini warga yang memang rumahnya sudah habis kan butuh tempat yang memang layak,” ungkap Ketua Komisi D DKI Jakarta, Ida Mahmudah saat dihubungi, Rabu (8/3).

Ia mengatakan sebenarnya ada dua pilihan lokasi yang bisa dijadikan tempat relokasi bagi warga yakni Rusunawa Nagrak dan Wisma Atlet. Namun, saat Ida berdialog dengan warga, warga menolak usul untuk direlokasi ke Rusunawa Nagrak karena lokasinya yang jauh.

“Nah, begitu (bicara) Wisma Atlet, Pak Heru juga mengatakan ‘ya sudah, nanti saya komunikasi lagi dengan warga saya’. Nah, ini kan memungkinkan kalau memang mereka mau di Wisma Atlet. Wisma Atlet ini seperti apartemen seperti hotel,” tuturnya.

Kemudian, sebagai jalan tengah, politikus PDIP ini pun mengusulkan agar dibangun rusun baru khusus bagi warga Plumpang. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, lanjut Ida, memiliki lahan di Jalan Yos Sudarso, Jakarta Utara yang bisa dijadikan lokasi rusun.

“Dananya dari mana? CSR Pertamina dong. Boleh tidak? Boleh. Kita sudah punya lahan, kita tinggal minta sama CSR Pertamina untuk membangunkan rusunawa yang memang kelasnya seperti hotel atau apartemen. Bisa kesana,” tuturnya.

Ida mengatakan, rusun ini bisa menjadi alternatif tempat tinggal sementara bagi warga Plumpang selama Pertamina melakukan penataan ulang. Namun, warga sebaiknya bisa dibiarkan memilih untuk menetap permanen di sana atau kembali lagi ke rumah mereka.

“Sementara atau lama? Lama alhamdulillah kalau kalian mau. Tapi paling tidak sambil menunggu rumah tinggal yang layak, kalian di sana. Kasian anak-anaknya, gak tega. Ini jangan ego kita. Karena ngomongnya begini warga ‘Bu, kami nggak apa-apa kok tinggalnya seperti kandang kambing tapi kami sudah nyaman dengan lokasi yang memang sudah puluhan tahun tinggal’. Kita nggak bisa ego itu. Kita harus mikirin nyawa kita, ya kita berharap tidak ada musibah lagi tapi kan kita tidak pernah tahu,” tegasnya.

Perlu Diusut

Terkait status kepemilikan lahan di Depo Pertamina Plumpang perlu ditelusuri lebih lanjut. Sebab, Pertamina ingin merelokasi warga untuk menjauhkan permukiman warga dari depo, kata

Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Ida Mahmudah yang mengaku pernah memediasi warga Plumpang dengan Pertamina saat dirinya masih menjadi Ketua Komisi A.

Namun, mediasi itu menemui kegagalan karena Pertamina pun tidak bisa menunjukkan dokumen kepemilikan lahan yang sah.

“Prinsip bahwa itu lahan sengketa, iya. Siapa kepemilikannya? Pertamina waktu itu tidak punya surat. Itu yang pasti,” ujar Ida saat dihubungi, Rabu (8/3).

Tak lama setelah mediasi itu, kata Ida, ada warga yang menemui dirinya dan menyatakan memiliki lahan di kawasan Plumpang dekat dengan depo Pertamina. Namun, ia tidak mendalami hal tersebut. Ia pun meminta agar pemerintah fokus untuk memberikan bantuan pada warga termasuk untuk memberikan tempat tinggal pengganti yang layak baik untuk tempat tinggal sementara maupun permanen.

“Tapi kalau saya bilang sih tidak usah mundur jauh. Prinsip bahwa warga harus segera diselamatkan iya. Karena mereka adalah manusia yang harus saya tempatkan di tempat yang layak sih itu,” kata politikus PDIP itu.

Sebelumnya, kebakaran terjadi di depo Pertamina Plumpang pada Jumat (3/3) lalu. Ratusan rumah terbakar dan hingga kini ada 19 korban meninggal dunia akibat kejadian itu. • yan

Pemkot Bekasi Perbanyak Polder Air untuk Cegah Banjir

BEKASI (IM) - Guna mencegah banjir, Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi, Jawa Barat memperbanyak polder air di 12 kecamatan di Kota Patriot.

“Upaya pencegahan banjir merupakan fokus kerja Pemkot Bekasi. Maka dari itu dibuatlah polder-polder air di sejumlah wilayah yang beberapa waktu lalu juga sudah diresmikan seperti Polder Air Jatiasih dan Bantargebang,” kata Plt Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto, Rabu (8/3).

Tri mengatakan pi-

haknya telah meresmikan pembangunan Polder Air Chandra di Kelurahan Jatiarahayu, Kecamatan Pondok Melati.

Polder air dibangun dengan perencanaan sedemikian rupa yang berfungsi untuk mencegah banjir dan untuk mengelola tata air seperti drainase kawasan, kolam retensi, tanggul keliling kawasan, pompa, dan pintu air. Dengan menggunakan polder maka satu kawasan akan terjaga jumlah airnya. Kondisi seperti itu sekaligus membebaskan wilayah

tersebut dari ancaman banjir. Di sisi lain pada saat musim kemarau kawasan polder justru tetap menyimpan air. Sebab sistem itu mengharuskan tersedianya waduk penahan air.

“Langkah-langkah pencegahan banjir juga terus dilakukan salah satunya dengan membuat polder air dimana segala perencanaan pembangunannya telah diurus dengan benar sehingga dapat terselesaikan dan terbangun kokoh serta aman berdasarkan site plan-nya,” ungkap Tri. • yan



PAPAN EDUKASI SEJARAH SUNGAI CILIWUNG

Dua warga mengamati foto pada papan informasi di taman tepi Sungai Ciliwung, Pasar Baru, Jakarta, Rabu (8/3). Setelah melakukan revitalisasi Sungai Ciliwung di kawasan tersebut dalam program pengendalian banjir, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga membuat taman-taman dengan dilengkapi papan-papan berisi foto dan tulisan sejarah setelah menetapkan Kanal Ciliwung (Jalan Antara dan Jalan Pasar Baru Selatan) sebagai objek cagar budaya baru.

PENGUMUMAN PUTUSAN PAILIT PT. PRAKARSA SEMESTA ALAM (Dalam Pailit) & IR. MUSYANIF (Dalam Pailit)

Berdasarkan ketentuan Pasal 15 Ayat (4) Undang-Undang Nomor: 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Utang, maka dengan ini Kurator PT. PRAKARSA SEMESTA ALAM (Dalam Pailit) & IR. MUSYANIF (Dalam Pailit) mengumumkan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1386K/Pdt.Sus-Pailit/2022 tertanggal 29 September 2022 jo. Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 19/Pdt.Sus-Pembatalan/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst jo. Nomor: 175/Pdt.Sus-PKU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst tertanggal 28 Juni 2022, terdapat:

PT. PRAKARSA SEMESTA ALAM, suatu perseroan terbatas yang berkedudukan di Daerah Khusus Ibukota Jakarta, beralamat di Jalan Darmawangsa-X No. 86, RT.7/RW.8, Cipeute Utara, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan (12150), dan;

IR. MUSYANIF, orang perseorangan yang berkedudukan di Daerah Khusus Ibukota Jakarta, beralamat di Jalan Haji Samali Nomor 42, Jakarta Selatan, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PT. TAMARA PROPERTI INDONESIA tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 19/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamiaian/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst, jo. Nomor 175/Pdt.Sus-PKU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst, tanggal 28 Juni 2022;

MENGADILI SENDIRI:

- Mengabulkan Permohonan Pembatalan Perdamiaian yang diajukan oleh Pemohon;
- Menyatakan PT. PRAKARSA SEMESTA ALAM dan IR. MUSYANIF dalam keadaan pailit;
- Memerintahkan Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk menunjuk seorang Hakim Pengawas yang ada di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut untuk perkara a quo;
- Mengangkat Sri. SUGIARTO HARIONO, S.H., M.Kn., terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Nomor: AHU-146/AH.04.03.2021, tanggal 12 Maret 2021 sebagai Kurator dalam perkara ini;
- Menetapkan imbalan jasa bagi Kurator akan ditentukan kemudian setelah Kepailitan berakhir;

Menghukum Para Terhohon Kasasi/Para Debitor untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Selanjutnya, berdasarkan Penetapan Hakim Pengawas tanggal 3 Maret 2023 dengan Nomor: 1386K/Pdt.Sus-Pailit/2022 jo. Nomor 19/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamiaian/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst jo. Nomor: 175/Pdt.Sus-PKU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst, telah ditetapkan bahwa:

Rapat Kreditor Pertama:
Hari/Tanggal: Rabu, 15 Maret 2023, pukul 09.00 W.I.B
Bertempat: Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jl. Bungur Besar Raya No.24,26,28, Gunung Sahari Selatan, Kecamatan Kemayoran, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta.

Batas Akhir Pengajuan Tagihan Kreditor:
Hari/Tanggal: Rabu, 19 April 2023, pukul 15.00 W.I.B
Bertempat: Kantor Tim Kurator di East Tower - Essence Darmawangsa Apartment Jalan Darmawangsa-X No. 86, RT.7/RW.8, Cipeute Utara, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan (12150).

Rapat Pencocokan Piutang:
Hari/Tanggal: Rabu, 19 April 2023, pukul 09.00 W.I.B
Bertempat: Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jl. Bungur Besar Raya No.24,26,28, Gunung Sahari Selatan, Kecamatan Kemayoran, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta.

Untuk itu Kurator meminta kepada Para Kreditor PT. PRAKARSA SEMESTA ALAM (Dalam Pailit) & IR. MUSYANIF (Dalam Pailit) agar segera mengajukan tagihan dengan membawa salinan/fotocopy bukti tagihan serta menunjukkan aslinya pada setiap hari/jam kerja kepada Kurator PT. PRAKARSA SEMESTA ALAM (Dalam Pailit) & IR. MUSYANIF (Dalam Pailit) yang beralamat di: Kantor Tim Kurator PT. PRAKARSA SEMESTA ALAM (Dalam Pailit) & IR. MUSYANIF (Dalam Pailit) East Tower - Essence Darmawangsa Apartment Jalan Darmawangsa-X No. 86, RT.7/RW.8, Cipeute Utara, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan (12150). No. Telp. 0881-0111-74633

Demikian pengumuman ini berlaku pula sebagai panggilan / undangan bagi Debitor, Para Kreditor, Kantor Pajak, dan Pihak Lain yang berkepentingan.

Jakarta, 09 Maret 2023
Hormat saya,
KURATOR
PT. PRAKARSA SEMESTA ALAM (Dalam Pailit) & IR. MUSYANIF (Dalam Pailit)
TTD.
SUGIARTO HARIONO, S.H., M.Kn.